LAPORAN KINERJA
KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak;
2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. penyuluhan perpajakan;
5. pelayanan perpajakan;
6. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. pelaksanaan ekstensifikasi;
8. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
9. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
11. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
12. pembetulan ketetapan pajak; dan
13. pelaksanaan administrasi kantor.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi KPP Pratama Semarang Selatan antara lain sebagai berikut:

1. Internal
   a. Sarana dan prasarana.
   b. Banyaknya aplikasi penunjang kegiatan yang belum saling terintegrasi.
   c. Banyaknya data potensi pajak yang kurang valid.
2. Eksternal
   a. Wilayah administrasi kerja yang terbatas.
   b. Potensi ekonomi.
   c. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas DJP.
   d. Kebijakan atau peraturan baru yang menyebabkan *potential loss* pada beberapa sektor penerimaan pajak.
   e. Kurangnya jumlah Wajib Pajak dengan *tax gap* yang tinggi untuk dilakukan penggalian potensi.

KPP Pratama Semarang Selatan memiliki wewenang berupa pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM dan PTLL dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wewenang tersebut KPP Pratama Semarang Selatan memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai Rencana Penerimaan Negara.

Para pegawai di lingkungan KPP Pratama Semarang Selatan merupakan pegawai yang telah lulus seleksi dan telah terlatih dalam menjalankan sistem administrasi perpajakan modern. Mereka telah dibekali dengan berbagai pelatihan dalam teori maupun praktik untuk mengaplikasikan sistem administrasi perpajakan modern, juga pembinaan mental sebelum dan sesudah ditempatkan di KPP Pratama Semarang Selatan. Secara umum para pegawai berperilaku sopan, memiliki keterampilan tinggi, serta menjunjung tinggi kode etik yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Selain sumber daya manusia, KPP Pratama Semarang Selatan ditunjang juga oleh tersedianya berbagai perangkat teknologi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas secara sistematis, efektif dan efisien, serta terawasi.

B. Sistematika Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issues)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
    a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
    b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
    c. standar nasional;
    d. terkait data dan narasi realisasi kinerja.

3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

Lampiran:

Perjanjian Kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan bertugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan pada bidang pengelolaan penerimaan negara di sektor pajak yaitu PPh, PPN, PPN BM dan PTLL. Dalam era globalisasi saat ini, KPP Pratama Semarang Selatan harus berpandangan jauh ke depan dalam berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Berkaitan dengan hal tersebut setiap pegawai di lingkungan KPP Pratama Semarang Selatan harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kompetensinya, sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung peningkatan penerimaan negara.

B. Lingkungan Strategis

1. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan tahun 2024

   Setelah reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 yang ditetapkan tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I terdiri atas:

   a. Kepala Kantor;
   b. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
   c. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data;
   d. Kepala Seksi Pelayanan;
   e. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
   f. Kepala Seksi Pengawasan I;
   g. Kepala Seksi Pengawasan II;
   h. Kepala Seksi Pengawasan III;
   i. Kepala Seksi Pengawasan IV;
   j. Kepala Seksi Pengawasan V;
   k. Kepala Seksi Pengawasan VI; dan
   l. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan Unit Eselon

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan per Desember 2024 secara keseluruhan mencapai 74 orang, yang terbagi dalam unit eselon sebagai berikut:

Eselon III	=	1 orang
Eselon IV	=	10 orang
Account Representative	=	21 orang
Pelaksana	=	30 orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	=	6 orang
Fungsional Penyuluh Pajak	=	2 orang
Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	=	4 orang

b. Berdasarkan golongan

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan per Desember 2024 menurut golongan dapat dilihat sebagai berikut:

Golongan I	=	0 orang
Golongan II	=	24 orang
Golongan III	=	42 orang
Golongan IV	=	8 orang

c. Berdasarkan jenis pendidikan

SD	=	0 orang
SMP	=	0 orang
SMA	=	0 orang
Program Diploma I	=	10 orang
Program Diploma III	=	19 orang
Sarjana (S1) / D4	=	35 orang
Pasca Sarjana / Master	=	10 orang
Doktor / S3	=	0 orang

C. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KPP Pratama Semarang Selatan telah menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

a. merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Semarang Selatan;
b. meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak;
c. meningkatkan kualitas edukasi, penyuluhan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak;
d. meningkatkan penegakan hukum yang efektif;
e. meningkatkan kualitas penyediaan data potensi perpajakan;
f. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan;

g. meningkatkan kualitas pegawai yang berintegritas, profesional, dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya; dan
h. meningkatkan pelaksanaan pengelolaan anggaran yang efektif dan berkualitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. penerimaan pajak yang sesuai target;
b. kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi;
c. pemenuhan layanan publik;
d. pelayanan prima;
e. peningkatan efektivitas penegakan hukum;
f. peningkatan efektivitas pemeriksaan;
g. peningkatan kualitas pencairan piutang pajak;
h. peningkatan penyediaan data yang berkualitas;
i. memiliki SDM yang memenuhi standar kompetensi;
j. terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, berkualitas, dan berdaya guna.

Kebijakan dan program yang ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis tahun 2024 yang berupa:

1. Sasaran Strategis

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif.
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif.
7. Penegakan hukum yang efektif.
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

2. Inisiatif Strategis

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan dari sisi kemudahan dan kecepatan layanan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten.
2. Mengingatkankan jatuh tempo pembayaran pajak kepada WP-WP penentu penerimaan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap akhir triwulan dengan stakeholder terkait.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,74
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,00%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,34%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00	100,59
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,72%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,04%
Penegakan Hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%

Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	73,60%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,47
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,00
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,19

2. Perbandingan Kinerja 2024 serta Capaian Kinerja

a. Capaian kinerja selama dua tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	116,63%	100,00%	105,64%	100,00%	100,17%
	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	105,53%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	N/A	N/A	100,00	90,14	100,00	105,74
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,76%	100,00%	120,17%	100,00%	120,00%
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	120,86%	100,00%	111,45%	100,00%	100,16%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	93,16%	100,00%	39,62%	100,00%	100,34%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	N/A	N/A	70,00%	84,00%	74,00%	88,80%

	edukasi dan penyuluhan						
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80,00	87,85	81,00	84,64	100,00	100,59
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	106,84%	90,00%	116,00%	90,00%	120,00%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	191,20%	100,00%	120,00%	100,00%	120,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	100,00%	120,00%	100,00%	120,00%
	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	100,00%	121,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	150,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	111,04%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80,00%	81,68%	80,00%	97,17%	N/A	N/A
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	75,00%	92,92%	75,00%	120,00%
	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	N/A	N/A	80,00%	100,00%	N/A	N/A
	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	61,79%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	120,00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	150,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	N/A	N/A	100,00%	124,40%	100,00%	120,00%

	Persentase penghimpunan data regional dari I LAP	N/A	N/A	55,00%	92,00%	55,00%	73,60%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	75,00%	94,00%	77,00%	100,00%	N/A	N/A
	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	N/A	N/A
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,77	85,00	95,86	85,00	97,00
	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik	90,00	99,94	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	117,47
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00	99,59
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	94,77%	100,00	120,00	91,00	99,19

b. Target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA DJP 2020-2024,

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hai ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020–2024, sehingga program-program yang terdapat dalam perencanaan searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020 – 2024 akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Peta Strategi

Visi:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan :”Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Proaktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan “

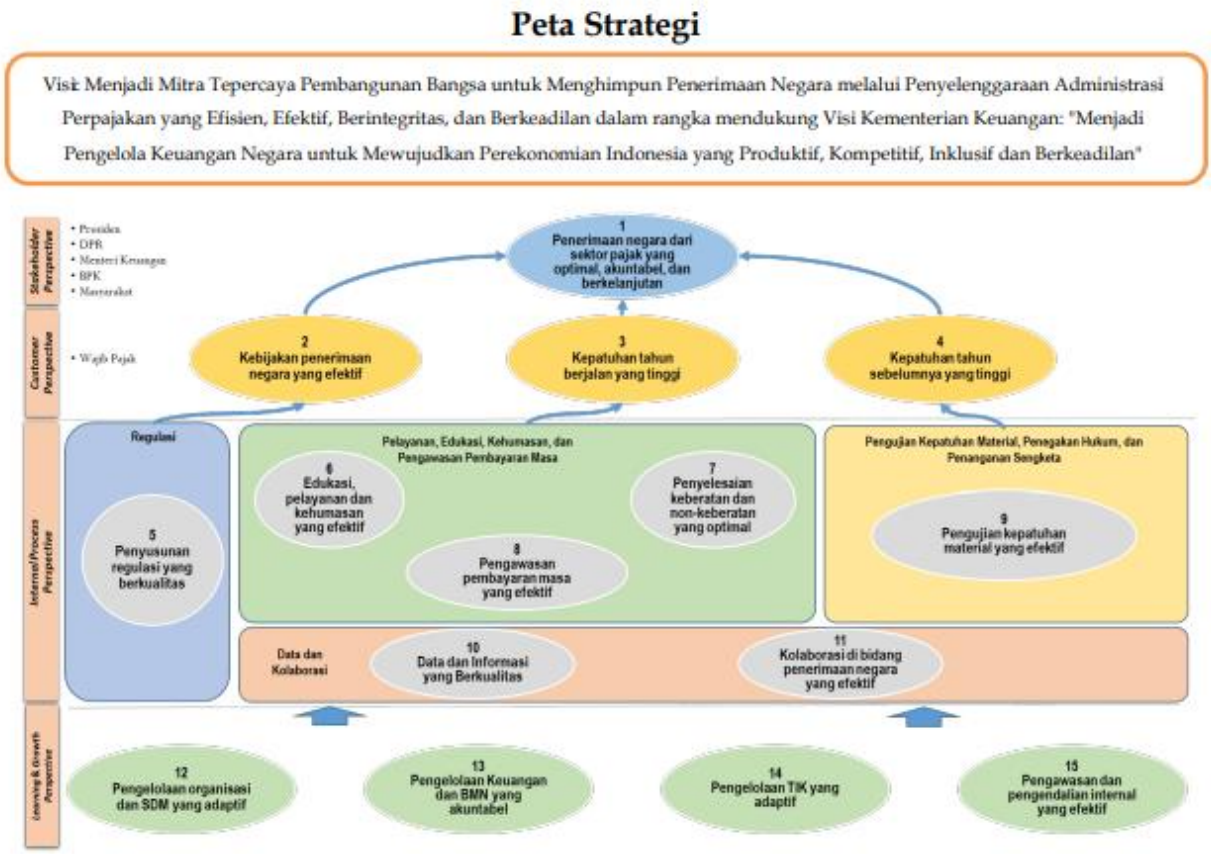

Keterangan:

1. Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, Direktorat Jenderal Pajak menyusun peta strategi sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Peta strategi ini terdiri dari empat perspektif yaitu *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning & Growth Perspective* yang semuanya itu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran strategis;
2. *Learning & Growth Perspective,* Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, pengelolaan TIK yang adaptif, pengawasan dan pengendalian internal yang efektif;
3. *Internal Process Perspective* yang terdiri dari penyusunan formulasi kebijakan fiskal, kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing serta sistem edukasi, pelayanan, kehumasan, juga sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

mendorong terciptanya kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi diharapkan mampu mewujudkan penerimaan pajak negara tercapai secara optimal;

4. Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

c. Standar Nasional

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process dan Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri atas:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi);
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

3. UPAYA-UPAYA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

a. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak penentu penerimaan (WP Badan dan Instansi Pemerintah), terutama PPh Pasal 21 dan PPN.

b. Mengintensifkan imbauan kepada Wajib Pajak yang terdapat SP2DK outstanding, Wajib Pajak terdapat data dari KPDJP, dan Wajib Pajak Potensial untuk melakukan peningkatan kegiatan PKM atas WP Badan yang terdapat dalam DPP Tahun 2024.
c. Peningkatan intensitas pembuatan Laporan Hasil Penelitian (LHPt).
d. Melakukan pengawasan pembayaran masa antara lain melalui penerbitan SP2DK atas faktur pajak yang telah diterbitkan, namun belum disetorkan PPN-nya, dan PPh Pasal 25 yang belum disetor.
e. Analisis Wajib Pajak berbasis *Compliance Risk Management (CRM).*
f. Pengumpulan data atau informasi Wajib Pajak dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil Wajib Pajak, pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak.
g. Analisis Wajib Pajak berbasis data pemicu dan data penguji.
h. Analisis atas data potensi perpajakan dan membuat Alket.
i. Penggalian data internet dan lapangan untuk membuat KPDL.
j. Tindak lanjut data DSE dengan pengamatan kantor maupun lapangan.
k. Penguasaan wilayah dan upaya penambahan Wajib Pajak bayar.

4. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

a. Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

   Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**51%**	**51%**	**77%**	**77%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**25,02%**	**56,81%**	**56,81%**	**70,49%**	**70,49%**	**100,17%**	**100,17%**
Capaian	**100,07%**	**111,39%**	**111,39%**	**91,55%**	**91,55%**	**100,17%**	**100,17%**

   Pada tahun 2024 target sebesar Rp 856.638.860.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 858.077.714.149 atau sebesar 100,17% dari target penerimaan sebesar 100%. Sektor dengan kontribusi terbesar di KPP Pratama Semarang Selatan untuk tahun 2024 adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 36,76%, pada urutan kedua yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi dengan kontribusi sebesar 20,15% dan urutan ketiga sebesar 13,38% dari Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

   Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**95,67**	**108,99**	**108,99**	**107,43**	**107,43**	**105,74**	**105,74**
Capaian	**95,67**	**108,99**	**108,99**	**107,43**	**107,43**	**105,74**	**105,74**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas masing-masing memiliki bobot sebesar 50%. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 sebesar 55,73% dari target 100% dengan kondisi pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kinerja tahun berjalan sebesar 14,76% dan dibandingkan pertumbuhan nasional tahun berjalan sebesar 5,02%. Rata-rata deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar 4,54% dari target dengan capaian maksimal sebesar 1%. Sehingga realisasi indeks penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi peerencanaan kas sebesar 105,74.

b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

   Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**51%**	**51%**	**77%**	**77%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**25.68%**	**58,35%**	**58,35%**	**72,79%**	**72,79%**	**100,16%**	**100,16%**
Capaian	**102.71%**	**114,42%**	**114,42%**	**94,14%**	**94,14%**	**100,16%**	**100,16%**

Capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 sebesar 100,16% dari target sebesar 100%. Target PPM tahun 2024 sebesar Rp833.748.693.530 dengan capaian sebesar Rp835.108.700.934. Tercapainya target penerimaan dari *voluntary payment* menandakan bahwa perekonomian dan usaha Wajib Pajak sudah pulih dan meningkatnya pendapatan Wajib Pajak serta mengolah data potensi perpajakan baik dari internal, eksternal, dan pihak lainnya untuk ditindaklanjuti seksi-seksi terkait dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap sektor-sektor tertentu.

2. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

   Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**60%**	**80%**	**80%**	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**103.87%**	**117,03%**	**117,03%**	**118,61%**	**118,61%**	**120,00%**	**120,00%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Pada tahun 2024 berbagai upaya dilakukan KPP Pratama Semarang Selatan untuk meningkatkan kemudahan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh di antaranya adalah memberi penyuluhan langsung maupun tidak langsung (*online*), memberikan informasi dan menjalin komunikasi yang baik melalui media elektronik serta metode pembayaran pajak secara elektronik yang aman, mudah,

cepat, dan *simple* untuk menghindari kesalahan dari pencatatan transaksi, data serta hasil transaksi akan langsung tersimpan di sistem DJP secara *real time*.

Persentase realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk tahun 2024 adalah 120,00% dari target 100%. Tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut dikarenakan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Selatan, di antaranya adalah dengan mengadakan kegiatan pojok pajak SPT Tahunan di beberapa wilayah Kecamatan Semarang Selatan, melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan terkait penyampaian SPT Tahunan di wilayahnya, aktif melakukan sosialisasi terkait materi perpajakan dengan sistem baru CORETAX yang mulai digunakan pada 1 Januari 2025 dan melakukan komunikasi sampai dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal, domisili, dan/atau tempat kegiatan Wajib Pajak.

c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**10.68%**	**23,23%**	**23,23%**	**30,55%**	**30,55%**	**100,34%**	**100,34%**
Capaian	**42.71%**	**46,45%**	**46,45%**	**40,68%**	**40,68%**	**100,34%**	**100,34%**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai sebesar 100,34% dari target 100%. Berbagai upaya dari masing2 seksi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan edukasi telah dilakukan meliputi memaksimalkan penerbitan SP2DK yang berkualitas dan tindak lanjut berupa panggilan konseling dengan melibatkan Kepala Kantor, meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pembayaran pajak, tindak lanjut melalui kegiatan analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Melakukan kegiatan penggalian potensi berdasarkan data yang belum ditindaklanjuti. Mengintensifkan penagihan persuasif dengan melakukan konfirmasi penegasan utang pajak. Memperbanyak bahan baku pemeriksaan dari DSPP Kolaboratif. Mengoptimalkan kolaborasi dengan seksi pengawasan untuk meningkatkan realisasi PKM Edukasi.

d. Edukasi dan pelayanan yang efektif

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**10%**	**40%**	**40%**	**60%**	**60%**	**74%**	**74%**
Realisasi	**25.17%**	**52,97%**	**52,97%**	**76,20%**	**76,20%**	**88,80%**	**88,80%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**88,80%**	**88,80%**

2. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**5%**	**5%**	**10%**	**15%**	**15%**	**85%**	**100%**
Realisasi	**6.13%**	**6,23%**	**6,23%**	**6,23%**	**6,23%**	**94%**	**110,59%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Semarang Selatan sebesar 120% dengan target 74,00% dan realisasi sebesar 88,80%. Capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan pada tahun 2024 sudah sangat baik dengan realisasi 100,59 melebihi target yaitu sebesar 100,00 dengan capaian 100,59%. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan KPP Pratama Semarang Selatan diantaranya yaitu:

a) memanfaatkan berbagai sarana komunikasi untuk memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan jalinan komunikasi yang lebih baik dan berkualitas, melalui layanan *WhatsApp* Wajib Pajak diingatkan kapan tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak sebagai sarana untuk mengubah perilaku dari Wajib Pajak yang tidak lapor dan tidak bayar menjadi Wajib Pajak taat lapor dan taat bayar, pembuatan video konten edukasi bertema SEHATI (Sore Bahas Tax Terkini) melalui media sosial *Instagram*, asistensi pengisian SPT Tahunan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak via Whatsapp, dan Edukasi One on One untuk perubahan perilaku;
b) melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban penyetoran pajak dan pelaporan SPT, sosialisasi aturan pajak dengan adanya sistem CORETAX, serta membuka kelas pajak secara tatap muka maupun *online* dalam rangka memberikan informasi dan edukasi di bidang perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya sehingga akan mendorong terciptanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam bidang perpajakan.

e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
Realisasi	**90.00%**	**102,20%**	**102,20%**	**105,98%**	**105,98%**	**120%**	**120%**
Capaian	**120.00%**	**113,56%**	**113,56%**	**117,76%**	**117,76%**	**120%**	**120%**

Dalam rangka efektivitas pengawasan pembayaran masa maka dilakukan prioritas tindak lanjut terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi Ditjen Pajak yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak. Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 (Strategis), penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi (Kewilayahan), dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan merupakan upaya untuk melakukan pengawasan pembayaran masa yang efektif. KPP Pratama Semarang Selatan segera menindaklanjuti data yang tersedia pada aplikasi dimaksud sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku, sehingga pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 120% dari target 90%, sehingga capaian akhirnya sebesar 120%.

f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**N/A**	**98,03%**	**98,03%**	**111,94%**	**111,94%**	**120%**	**120%**
Capaian	**N/A**	**98,03%**	**98,03%**	**111,94%**	**111,94%**	**120%**	**120%**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Berbagai upaya dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Selatan untuk memenuhi semua kegiatan dan program yang sudah ditetapkan termasuk penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Ketersediaan data pada aplikasi *approweb* dan aplikasi lainnya yang segera ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SP2DK yang berkualitas terus diupayakan, sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan Wajib Pajak sehingga diharapkan mendorong kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Realisasi tahun 2024 tercapai sebesar 120,00% dari target 100,00%.

2. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**119.92%**	**111.84%**	**111.84%**	**118,11%**	**118,11%**	**119,72%**	**119,72%**
Capaian	**119.92%**	**115.92%**	**115.92%**	**118,11%**	**118,11%**	**119,72%**	**119,72%**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data Matching. Tahun 2024 realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 119,72% dari target 100,00% dengan capaian 119,72%.

3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**99,07%**	**99,07%**	**111,04%**	**111,04%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**99,07%**	**99,07%**	**111,04%**	**111,04%**

Pelaksanaan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditentukan oleh 3 komponen yaitu Laporan Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, dan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Realisasi tahun 2024 sebesar 111,04% dengan target 100,00%. Langkah-langkah pencapaian IKU ini telah dilakukan dengan memperbanyak analisis mandiri untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, menyiapkan DSPC yang mempunyai kemampuan bayar yang tinggi, menyiapkan DSPP kolaboratif dan DSPP RBP yang berkualitas, melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah menyetujui hasil pemeriksaan agar melakukan pembayaran sesuai dengan komitmen.

g. Penegakan hukum yang efektif

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

1. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**105.66%**	**109.20%**	**109.20%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**105.66%**	**109.20%**	**109.20%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 melampaui target yaitu sebesar 120,00% dari target 100%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan komitmen, koordinasi dan kerja sama yang baik dari setiap fungsional pemeriksa dan petugas pemeriksa pajak.

2. Tingkat efektivitas penagihan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	48,55%	73,70%	73,70%	96,27%	96,27%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Tingkat efektivitas penagihan melampaui target 75% dengan realisasi 120,00% Proses penagihan aktif dari mulai penerbitan surat teguran sampai dengan sita sudah dilaksanakan, namun jika Wajib Pajak belum juga melaksanakan kewajiban untuk membayar utang pajaknya maka proses pencegahan pun dilaksanakan.

3. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	100.00%	100.00%

Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu dengan Melakukan rapat koordinasi terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan bukti permulaan setelah melakukan analisis terhadap Wajib Pajak.

h. Data dan informasi yang berkualitas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

1. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	37.97%	50.36%	50.36%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	100.72%	100.72%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ditargetkan untuk tahun 2024 sebesar 100,00% tercapai realisasi sebesar 120,00% dengan capaian 120,00%. KPP Pratama Semarang Selatan berupaya memenuhi target penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan melakukan visit dan kegiatan pengamatan dalam rangka pengumpulan data lapangan sebanyak-banyaknya sehingga apabila terdapat data yang tidak dapat ditemukan validitas pemilik aset/usaha masih dapat disubstitusi dengan data lain agar dapat memenuhi capaian target IKU.

2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**10%**	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**	**55%**	**55%**
Realisasi	**5.60%**	**61.60%**	**61.60%**	**73,60%**	**73,60%**	**73,60%**	**73,60%**
Capaian	**56.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 melampaui target yaitu sebesar 73,60% dari target 55,00% dengan capaian 120,00%.

i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

1. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**193.75%**	**110.64%**	**110.64%**	**120.00%**	**120.00%**	**117,47%**	**117,47%**
Capaian	**120.00%**	**110.64%**	**110.64%**	**120.00%**	**120.00%**	**117,47%**	**117,47%**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar 100,00% dengan realisasi 117,47%, sehingga capaiannya sebesar 117,47%. Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai baik dari segi teori maupun praktik seperti bimtek, diklat, *In House Training*, *learning course*, *transfer knowledge*, dan *Focus Group Discussion* serta tersedianya aplikasi yang mendukung sebagai bekal para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

2. Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**-**	**-**	**-**	**85%**	**85%**	**85%**	**85**
Realisasi	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**97**	**97**
Capaian	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**117,65%**	**117,65%**	**114,12%**	**114,12%**

Indeks penilaian integritas unit tercapai sebesar 97 dari target 85. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pegawai memiliki komitmen tinggi menjaga integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan lainnya, teladan dari pimpinan dan sistem pengawasan dari atasan langsung serta program *Knowing Your Employee* yang diterapkan secara konsisten merupakan upaya pemberian kesadaran penuh terhadap setiap pegawai untuk senantiasa menegakkan integritas dan menjaga nama baik institusi di manapun berada, dalam setiap situasi dan kondisi apapun.

3. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**23**	**47**	**47**	**70**	**70**	**90**	**90**
Realisasi	**33.25**	**59.61**	**59.61**	**87,92**	**87,92**	**99,59**	**99,59**
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

Persentase efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terselesaikan dengan realisasi sebesar 99,59% dari target 90% dengan capaian 110,65%. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan penyampaian laporan pemantauan dilaksanakan tepat waktu.

j. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**100**	**97,89**	**97,89**	**120**	**120**	**120**	**120**
Capaian	**100**	**102,51**	**102,51**	**120**	**120**	**120**	**120**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Semarang Selatan tercapai 99,19 dari target 91 dengan capaian sebesar 120. Capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar 98,39% dan capaian SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) sebesar 100,00%. SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Pekerjaan terkait penggunaan anggaran tahun 2024 telah dilaksanakan secara optimal dengan selalu memperhatikan 8 indikator IKPA yaitu revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, capaian output, dan dispensasi SPM serta 4 indikator SMART yaitu penyerapan, konsistensi, capaian rincian output, efisiensi sehingga berpengaruh terhadap pencapaian anggaran yang lebih berkualitas.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk meningkatkan kinerja, dibutuhkan efisiensi SDM dengan menggunakan waktu dan sumber daya yang efektif. Salah satu caranya yaitu memanfaatkan peranan teknologi informasi dalam berbagai bidang, dengan dikembangkannya aplikasi-aplikasi yang memberikan kemudahan penggalian potensi dan penyelesaian pekerjaan rutin. Pelaporan, konsultasi, dan pembayaran pajak juga bisa dilakukan secara *online* tanpa harus datang atau dilayani secara tatap muka. Untuk meningkatkan kualitas SDM, secara rutin diselenggarakan kegiatan *In House Training* dengan materi peraturan-peraturan terbaru serta *transfer knowledge* hasil diklat, bimtek maupun pelatihan yang diikuti oleh pegawai.

6. ANALISIS KEGIATAN PENUNJANG

Untuk mendukung pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, KPP Pratama Semarang Selatan telah melakukan penyuluhan, pemberian edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak baru, melaksanakan sosialisasi terkait materi perpajakan dengan sistem terbaru CORETAX serta pelaksanaan kelas pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

7. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Tabel Review Efektivitas Mitigasi Risiko
KPP Pratama Semarang Selatan
Periode Manajemen Risiko: Tahun 2024
Periode Review: Tahun 2025

Kegiatan	:	Review Efektivitas Mitigasi Risiko
Disusun oleh	:	Afri Yunia Pradani
Tanggal	:	16 Januari 2025

A. Implementasi Rencana Aksi mitigasi risiko

Jumlah rencana aksi mitigasi risiko (7)	Jumlah rencana aksi mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dan didukung oleh dokumen yang lengkap dan relevan (8)	Nilai implementasi rencana aksi mitigasi risiko (9)
16	16	100

Jumlah rencana aksi mitigasi risiko yang telah disusun KPP Pratama Semarang Selatan terdapat 16 kegiatan di mana atas semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan didukung oleh dokumen yang lengkap dan relevan sehingga implementasi rencana aksi mitigasi risiko bernilai 100.

B. Keberhasilan Menurunkan Besaran Risiko

Jumlah risiko utama (10)	Jumlah risiko utama yang berdeviasi negative (11)	Jumlah risiko utama yang berdeviasi 0 atau positif (12)	Nilai keberhasilan menurunkan besaran risiko (13)
5	1	4	80

Jumlah risiko utama yang disusun dalam proyeksi risiko berdasarkan 5 (lima) risiko tertinggi yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (persentase realisasi penerimaan pajak)

2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas)
3. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)
4. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM))
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum)

dari kelima risiko di atas terdapat satu risiko utama yang berdeviasi negatif yaitu penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target, sehingga keberhasilan menurunkan besaran risiko bernilai 83.

C. Hasil Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) (14)	Jumlah IKU (15)			Nilai hasil penerapan manajemen risiko (16)
	Merah	Kuning	Hijau	
110,16	-	-	20	100

Total 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang tertulis sebelumnya berwarna hijau, sehingga hasil penerapan manajemen risiko bernilai 100.

Dari ketiga aspek efektivitas berikut jika dikalikan dengan bobot masing-masing menghasilkan Nilai Efektivitas Mitigasi Risiko tertimbang yaitu sebesar 94 atau dalam predikat efektif.

Aspek Efektivitas	Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang
Implementasi rencana aksi mitigasi risiko	100	30%	30
Keberhasilan menurunkan besaran risiko	80	30%	24
Hasil penerapan manajemen risiko	100	40%	40
Nilai Efektivitas Mitigasi Risiko			94 (EFEKTIF)

8. RENCANA AKSI

a. Persentase realisasi penerimaan pajak
   1. Pengawasan secara intensif terhadap WP penentu penerimaan melalui kegiatan PPM untuk kewajiban pajak tahun berjalan

2. Mengintensifkan pengawasan WP OP dengan:
    a) Menginventarisir WP NE KLU dokter, pekerjaan bebas dan yang ada data transaksi.
    b) Permintaan data penghasilan dari pemberi kerja ke Kanwil dan KPP terkait.
    c) Menindaklanjuti data pemicu terkait bukti pemotongan PPh Pasal 21 terutama bukan pegawai.
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kewajiban Bendahara terkait penerapan Coretax.
4. Melakukan pengawasan terhadap WP pusat KPP Pratama Semarang Selatan yang memiliki cabang di luar wilayah.
5. Peningkatan kompetensi pegawai melalui IHT, Bimtek, dan e-learning.

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
    1. Melakukan analisis tren pembayaran waktu pembayaran terhadap PKP, WP instansi pemerintah dan Wajib Pajak Penentu lainnya.
    2. Melakukan rapat penyusunan prognosa dengan seksi terkait dan memastikan nilai pembayaran pajak dengan menghubungi Wajib Pajak secara rutin untuk mengetahui proyeksi pembayaran pajak yang akan dilakukan dalam bulan tersebut.

c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
    1. Pengawasan pembayaran masa WP 80% penentu penerimaan. Untuk WP IP dilakukan koordinasi dengan WP terkait, Kanwil DJPB, dan BUD Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui progress dan proyeksi penyerapan DIPA/DPA.
    2. Pendampingan bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya sistem yang baru.
    3. Melakukan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 WP Badan dan Orang Pribadi.
    4. Melakukan perluasan basis pajak dengan kegiatan ekstensifikasi (penambahan WP baru) dengan memanfaatkan KPD *Mobile*.

d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
    1. Melaksanakan *WhatsApp Blast* penyampaian SPT Tahunan.
    2. Publikasi Pelaporan SPT Tahunan melalui media sosial (Instagram).
    3. Melaksanakan Kelas Pajak online dengan tema SPT Tahunan.
    4. Menerbitkan Surat Imbauan/Surat Teguran penyampaian SPT Tahunan.
    5. Menghubungi Wajib Pajak secara intens untuk menyampaikan SPT Tahunan.
    6. Melakukan kunjungan/visit ke lokasi Wajib Pajak.

e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
    1. Menerbitkan SP2DK yang berkualitas dengan mempertajam analisis data pemicu, penguji, maupun secara mandiri.

2. Melakukan kegiatan penggalian potensi berdasarkan data yang belum ditindaklanjuti.
3. Melakukan konseling kolaborasi dengan penyidik Kanwil atas SP2DK dengan potensi data konkret di atas 100 juta.
4. Memperbanyak bahan baku pemeriksaan dari DSPP Kolaboratif.
5. Melakukan pengujian yang berkualitas sehingga dapat diterbitkan SKP yang kredibel.
6. Mengintensifkan penagihan persuasif dengan melakukan konfirmasi penegasan utang pajak.
7. Mengupayakan pencairan dari upaya penagihan WP yang ada di daftar DSPC dan Non DSPC.
8. Mengintensifkan kegiatan Edukasi dalam rangka perubahan perilaku lapor dan bayar.
9. Melakukan monitoring terhadap komitmen Wajib Pajak yang masuk dalam daftar PKM Edukasi.

f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
   1. Mengadakan Inklusi Pajak.
   2. Melasanakan asistensi kepada Wajib Pajak via Whatsapp dan tatap muka.
   3. Menyediakan Helpdesk konsultasi perpajakan (via Whatsapp dan tatap muka).
   4. Melakukan edukasi perpajakan melalui media sosial (Instagram, Youtube).

g. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
   1. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan KPP secara terus menerus.
   2. Menindaklanjuti DSPT.

h. Persentase pengawasan pembayaran masa
   1. Melakukan penelitian data perpajakan tahun berjalan.
   2. Menerbitkan Surat Teguran atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan sesuai dengan Daftar Nominatif STP.

i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
   1. Proses DPP sebaiknya dilakukan setiap awal Triwulan agar AR memiliki waktu yang maksimal untuk melakukan analisa dan penerbitan SP2DK.
   2. Melakukan kunjungan kinerja (visit) ke Wajib Pajak untuk SP2DK.
   3. Melakukan pembahasan atas SP2DK yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran bertahap.

j. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
   1. Melakukan penelitian data perpajakan selain tahun berjalan.
   2. Daftar nominatif STP dan data pemicu segera ditindaklanjuti.

k. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
   1. Memperbanyak analisis mandiri untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas.
   2. Menyiapkan DSPC yang mempunyai kemampuan bayar yang tinggi.
   3. Menyiapkan DSPP kolaboratif dan DSPP RBP yang berkualitas.

4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah menyetujui hasil pemeriksaan agar melakukan pembayaran sesuai dengan komitmen.

l. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
   1. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan.
   2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usulan DSPP.
   3. Mengupayakan Wajib Pajak untuk menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
   4. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi FPP melalui kegiatan pelatihan/FGD/IHT/Bimtek pemeriksaan

m. Tingkat efektivitas penagihan
   1. Menindaklanjuti data DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan)
   2. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa atas WP yang menjadi prioritas (sesuai data DSPC)
   3. Melakukan konseling dan edukasi terkait tindakan penagihan aktif (PMK-189) dan keterkaitannya dengan pelunasan
   4. Memprioritaskan tindakan Pemblokiran rekening Wajib Pajak dan Sita Aset Wajib Pajak

n. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
   1. Melakukan rapat koordinasi terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan bukti permulaan.
   2. Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan bukti permulaan.

o. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
   1. Memaksimalkan kegiatan pengamatan Wajib Pajak guna mendapatkan data dan informasi yang berkualitas.

p. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
   1. Melaksanakan koordinasi secara proaktif dengan Kanwil.
   2. Melakukan penghimpunan data regional dari ILAP.

q. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
   1. Menyelenggarakan IHT sesuai rencana yang telah dibuat.
   2. Melaksanakan coaching kepada bawahan oleh masing-masing atasan langsung.
   3. Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM.

r. Indeks Penilaian Integritas Unit
   1. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan menguatkan integritas pegawai.
   2. Meningkatkan kualitas kegiatan pemantauan kode etik dan kode perilaku.
   3. Melaksanakan program ICV terkait nilai-nilai integritas di tahun 2024.

s. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
   1. Melaksanakan DKO Triwulanan tahun 2024 tepat waktu dan enyampaikan Risalah DKO, Laporan Pelaksanaan IS, Laporan Progres IKU, dan Laporan MR Triwulanan (form IV), LPKR tepat waktu

t. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Melakukan percepatan belanja.
2. Belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja KPP Pratama Semarang Selatan bersumber dari DIPA tahun 2024 sebesar Rp3.454.784.000,00 lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.544.065.000,00.

Penyerapan anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp3.146.366.034,00 atau sebesar 91,07%, terhadap kegiatan belanja tersebut dalam pelaksanaannya tetap memegang teguh prinsip belanja yang efektif, efisien dan tepat guna.

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disampaikan bahwa selama tahun 2024, pencapaian kinerja KPP Pratama Semarang Selatan menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan semua IKU dapat tercapai. KPP Pratama Semarang Selatan berhasil mencapai target penerimaan tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100,17% dari target yang diberikan. Hal ini menunjukkan tren positif pencapaian penerimaan pajak.

Semoga dengan semua kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dapat terus memberi semangat dan menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2025.

Semarang, 22 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Semarang Selatan,

Ditandatangani secara elektronik

Hery Sumartono

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-12/WPJ.10/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

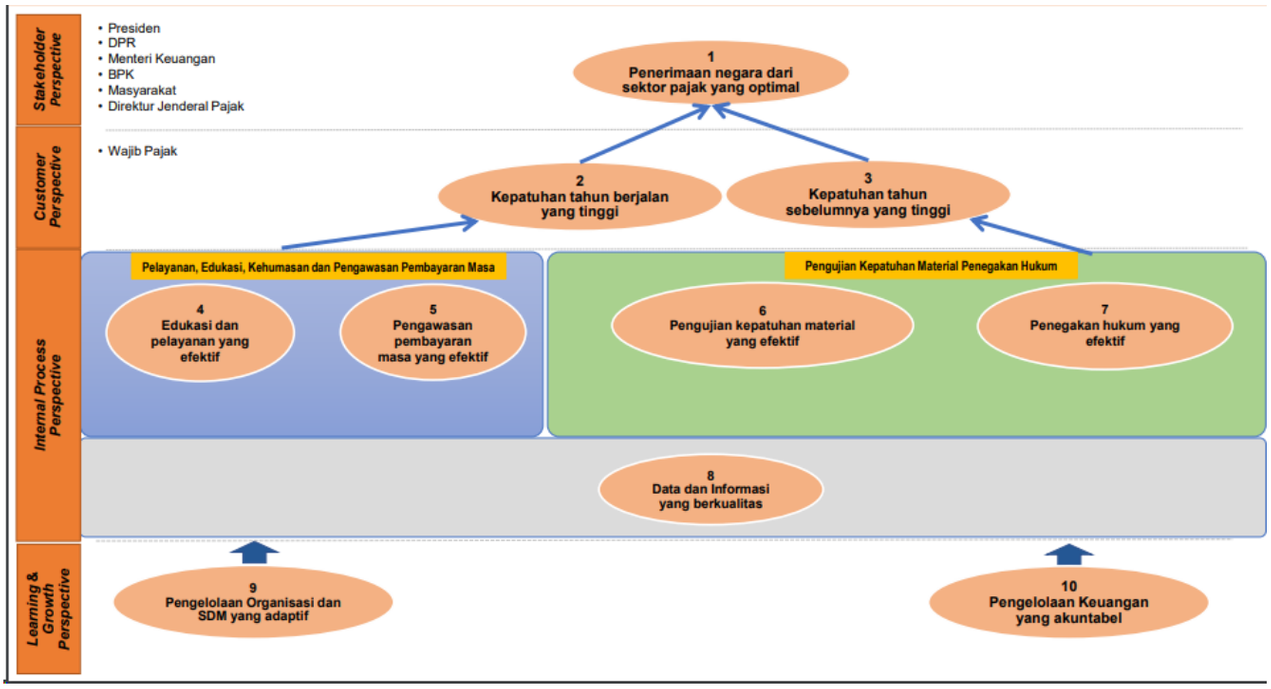

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	**Rp**	**777,632,000**
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	291,649,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	247,880,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	238,103,000
B. Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**2,664,922,000**
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2,118,916,000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	546,006,000
Total	**Rp**	**3,442,554,000**

Semarang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,

Ditandatangani Secara Elektronik
Max Darmawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Selatan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hadi Susilo

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Semarang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Selatan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hadi Susilo

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Income	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan dari sisi kemudahan dan kecepatan layanan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten	Tercapainya indeks kepuasan pelayanan dan penyuluhan melebihi tahun sebelumnya.	1. Memperbaharui konten edukasi perpajakan yang diputar di ruang TPT 2. Melakukan percepatan penyelesaian permohonan validasi PHTB menjadi satu hari kerja dan permohonan pengukuhan PKP	Peningkatan pelayanan prima	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	

				penyelesaiaanya bias ditunggu (langsung selesai). 3. Melakukan asistensi dan pendampingan lanjutan paska konsultasi Wajib Pajak melalui video conference 4. Meningkatkan kompetensi melalui kegiatan "curah pikiran" secara rutin setiap dua pecan sekali				
2.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Mengingatkankan jatuh tempo pembayaran pajak kepada WP-WP penentu penerimaan secara periodik.	Pesan pengingat jatuh tempo pembayaran pajak kepada WP-WP penentu penerimaan	Pengiriman pesan pengingat jatuh tempo pembayaran pajak kepada WP-WP penentu penerimaan	Pesan pengingat jatuh tempo pembayaran pajak	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I s.d. VI	

3.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap akhir triwulan dengan stakeholder terkait.	Kesesuaian realisasi belanja dengan perencanaan anggaran.	TW1 s.d TW 4 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai dengan trajectory target pelaksanaan anggaran.	Nilai IKPA dan capaian SMART yang maksimal	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	

Semarang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Selatan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hadi Susilo

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hadi Susilo	NAMA	Max Darmawan
NIP	19700606 199012 1 001	NIP	19680807 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis

7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Semarang, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Hadi Susilo

19700606 199012 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Max Darmawan

19680807 199503 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	73 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Semarang, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Hadi Susilo

19700606 199012 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Max Darmawan

19680807 199503 1 001

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-12A/WPJ.10/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-12/WPJ.10/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)

Semarang, 2 September 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,

Ditandatangani Secara Elektronik
Nurbaeti Munawaroh
NIP 19720505 199603 2 001

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Selatan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hery Sumartono
NIP 19700530 199103 1 002

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hery Sumartono	NAMA	Nurbaeti Munawaroh
NIP	197005301991031002	NIP	197205051996032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah I
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran

		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	

PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Semarang, 2 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Hery Sumartono

NIP 19700530 199103 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Nurbaeti Munawaroh

NIP 19720505 199603 2 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	74 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	*Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak				8%	8%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				8%	8%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				6%	6%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				7%	7%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				5%	5%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa				30%	30%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan				100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan				100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian				100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan				5%	5%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan				10%	10%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				5%	5%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85

	19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko				8	8	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				100	100	100	100
KONSEKUENSI									
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*								
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*								

Semarang, 2 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Hery Sumartono
NIP 19700530 199103 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Nurbaeti Munawaroh
NIP 19720505 199603 2 001